

# Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

Aulia Nur Rahmah<sup>1</sup>, Siti Tiara Maulia<sup>2</sup>

Program Studi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi<sup>1,2</sup>  
\*E-mail: [auliaexcell@gmail.com](mailto:auliaexcell@gmail.com)

## Abstrak

Politik dinasti telah menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia, mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan seluruh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi, serta mengusulkan pendekatan pendidikan sebagai solusi yang berkelanjutan. Melalui metode literature study, analisis deskriptif-analitik menyoroti ketidaksetaraan dalam akses politik, pembatasan partisipasi masyarakat, dan penurunan kualitas kepemimpinan yang disebabkan oleh politik dinasti. Dalam upaya memperbaiki fondasi demokrasi yang rapuh, pendidikan politik berkualitas menjadi krusial. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu memasukkan materi yang mendalam tentang demokrasi, hak asasi manusia, etika politik, dan tata kelola yang baik dalam kurikulum mereka. Diperlukan juga peran aktif pemerintah dan masyarakat sipil dalam memastikan efektivitas pendidikan politik. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya demokrasi yang sehat dan bersedia terlibat secara aktif dalam memerangi politik dinasti serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Politik Dinasti, Demokrasi Pancasila, Pemerintahan



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

## Pendahuluan

Dinamika politik di Indonesia terus dipengaruhi oleh keberadaan politik oligarki, yang secara sistematis memelihara dominasi mereka dalam pemerintahan. Meskipun prinsip demokrasi menawarkan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, kenyataannya, kekuatan politik seringkali berkonsentrasi di tangan sejumlah keluarga yang mendominasi arena politik. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah struktural dalam sistem politik Indonesia, tetapi juga memperkuat pola pikir klanisme dan nepotisme di dalamnya. Keluarga-keluarga politik ini, yang telah membentuk jaringan kuat melalui ikatan keluarga dan politik, secara efektif mempertahankan kekuasaan mereka dari generasi ke generasi. Mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini, keberadaan politik oligarki terus menjadi penghalang utama dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Ketika membicarakan dinasti politik dalam konteks politik Indonesia pasca-reformasi, perhatian publik seringkali tertuju pada konsolidasi kekuasaan dalam keluarga Presiden Jokowi. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, di pemerintahan daerah menimbulkan perdebatan tentang perluasan pengaruh dinasti politik secara nasional. Selain itu, pernikahan adik Presiden dengan Ketua Mahkamah Konstitusi turut memperkuat jaringan kekuasaan politik keluarga Jokowi. Di sisi lain, Provinsi Banten menjadi pusat perhatian dengan dominasi dinasti politik yang dimulai dari Chasan Sohib dan diteruskan oleh Ratu Atut Chosiyah. Atut berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dengan melibatkan anggota

keluarganya dalam berbagai posisi eksekutif dan legislatif, mencakup DPD dan DPR. Semua ini menunjukkan bahwa dinasti politik tetap menjadi isu sentral dalam politik Indonesia, menyoroti tantangan dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang adil.

Keterkaitan keluarga atau kerabat pejabat dalam kepemimpinan daerah yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia menyoroti fenomena politik dinasti yang semakin mengakar. Dalam analisis politik modern, kehadiran dinasti politik seringkali terkait dengan kekurangan dalam sistem demokrasi yang menghasilkan otonomi yang berlebihan. Fenomena ini cenderung menciptakan dominasi kekuasaan etnis di tingkat daerah, yang pada akhirnya memungkinkan tumbuhnya dinasti politik. Selain itu, rendahnya etika politik seringkali disebabkan oleh kurangnya kaderisasi partai politik dan pendidikan politik yang memadai. Dalam konteks ini, upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat merupakan langkah penting dalam menanggulangi fenomena politik dinasti dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dinasti politik menciptakan lingkungan yang memungkinkan keluarga politik untuk mempertahankan dan mengokohkan kekuasaannya secara turun-temurun, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong pluralisme, partisipasi, dan akuntabilitas yang sehat.

Meskipun demokrasi pada dasarnya memberikan kebebasan bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam proses politik, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dinasti politik memberikan dampak negatif yang signifikan bagi demokrasi Indonesia.

Dinasti politik tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap demokrasi Indonesia, tetapi juga mengancam integritas sistem politik secara keseluruhan. Praktik-praktik seperti nepotisme, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik secara umum. Selain itu, dengan terbatasnya regenerasi kepemimpinan yang hanya melibatkan sejumlah keluarga tertentu, peluang untuk terciptanya inovasi dan perubahan yang diperlukan dalam pemerintahan menjadi terhambat. Hal ini mengancam stabilitas dan kemajuan negara dalam jangka panjang, serta menciptakan ketidakadilan yang merugikan bagi sebagian besar masyarakat yang berharap pada pemerintahan yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi praktik dinasti politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang sehat merupakan suatu keharusan bagi kemajuan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berkeadilan. Upaya-upaya tersebut dapat mencakup peningkatan transparansi dalam proses politik, penguatan lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum, serta pembangunan budaya politik yang berorientasi pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik.

Fenomena politik dinasti telah menjadi penghalang utama bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik di negara demokrasi. Meskipun prinsip dasar demokrasi menekankan keterlibatan seluas mungkin dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik, kenyataannya politik dinasti telah menciptakan kesenjangan besar antara keluarga petahana dengan masyarakat biasa. Hal ini menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses dan peluang partisipasi politik, di mana keluarga politik memiliki keunggulan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh warga lainnya. Esensi sejati dari demokrasi yang menegaskan prinsip kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat terancam terkikis oleh praktik politik dinasti. Selain itu, politik dinasti juga mendorong timbulnya pragmatisme politik, di mana anggota keluarga atau kerabat penguasa didorong untuk mengejar kepentingan pribadi atau keluarga dengan menjadi pejabat publik tanpa mempertimbangkan kapasitas atau integritas mereka dalam melayani kepentingan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab.

Pesan yang terkandung dalam teori Lord Acton mengenai korupsi dan kekuasaan memiliki relevansi yang kuat dalam konteks dinasti politik di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Soeharto. Meskipun dinasti politiknya tidak dominan secara langsung di panggung politik, kekuasaan absolut yang dimiliki Soeharto dan keluarganya dalam mengendalikan akses ekonomi

telah menciptakan oligarki yang merajalela. Dalam situasi di mana kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi menjadi lebih besar.

Ini memperkuat pandangan Acton bahwa "kekuasaan cenderung membusukkan dan kekuasaan mutlak membusukkan dengan mutlak." Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di bawah pemerintahan Soeharto menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan politik dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam dinamika politik Indonesia, oligarki di dalam partai politik telah menjadi penyebab utama dari kemunduran dalam mekanisme pencalonan dan kandidasi. Penentuan kandidat sering kali tidak mencerminkan standar demokratis yang seharusnya, karena lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit partai daripada kualitas dan integritas calon. Fenomena dinasti politik semakin memperkuat dominasi elit politik dari tingkat lokal hingga nasional, dengan fokus utama untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol dalam struktur partai politik. Dampaknya, ruang demokrasi internal partai politik menjadi semakin terbatas dan terkendali oleh pengaruh dinasti politik yang terus berkembang.

Namun, perkembangan dinasti politik juga memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Meskipun banyak yang mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, ada pandangan yang berargumen bahwa larangan terhadap partisipasi keluarga petahana dalam politik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan konstitusi warga negara. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani fenomena dinasti politik, di mana pemerintah harus mempertimbangkan antara memelihara prinsip demokrasi yang sehat dan melindungi hak-hak individu sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks ini, perlu dilakukan reformasi yang cermat dan komprehensif dalam sistem politik untuk memastikan bahwa proses pemilihan kandidat dan pemimpin benar-benar mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara luas, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak individu.

## **Metode**

Penelitian tentang Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia menggunakan metode penelitian pustaka atau library research. Dalam metode ini, penulis menitikberatkan pada analisis terhadap data primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan deskriptif-analitik dipilih untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan, serta untuk menganalisis permasalahan yang ada serta menemukan korelasi antara berbagai elemen yang terlibat. Sumber data primer berupa buku-buku yang secara langsung terkait dengan topik, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, media, dan jurnal yang relevan dengan politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena politik dinasti dalam konteks demokrasi Indonesia yang sedang berkembang dan menjadi fokus perbincangan di berbagai forum politik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Politik Dinasti dan Kontestasi Politik**

Politik dinasti dan dinasti politik memperlihatkan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam politik. Politik dinasti menyoroti mobilisasi regenerasi kekuasaan oleh kelompok elit dengan tujuan mempertahankan atau memperoleh kekuasaan politik, sementara dinasti politik menunjukkan bagaimana kekuasaan diwariskan melalui hubungan keluarga atau kekerabatan. Keduanya menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat tetap terkonsolidasi dalam suatu kelompok tertentu, seringkali membatasi ruang demokrasi yang seharusnya luas dan terbuka.

Dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara politik dinasti dan dinasti politik, penting untuk menyadari bagaimana sistem reproduksi kekuasaan tersebut dapat mempengaruhi dinamika politik dan demokrasi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih

kritis terhadap praktik-praktik politik yang menghasilkan konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat, serta mendorong upaya-upaya reformasi yang bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif dan transparan.

Dinasti politik telah menjadi fenomena yang mapan dalam politik Indonesia, dengan jejaknya yang terlihat sejak era Orde Lama hingga saat ini. Keluarga-keluarga politik seperti keluarga Soekarno, Gus Dur, dan SBY menunjukkan bagaimana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keterlibatan anggota keluarga dalam politik, baik sebagai pejabat terpilih maupun pemegang jabatan penting dalam partai politik, telah menjadi pola umum dalam penyaluran kekuasaan politik di Indonesia. Namun, fenomena ini juga memicu kritik dan pertanyaan tentang esensi demokrasi serta kesetaraan dalam akses politik. Sebagai negara demokratis, penting untuk mengevaluasi dampak dari dominasi dinasti politik terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa proses politik tetap terbuka dan inklusif bagi semua warga negara. Evaluasi yang cermat dan langkah-langkah reformasi yang sesuai mungkin diperlukan untuk mengatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat sistem politik yang demokratis dan transparan.

Kehadiran dinasti politik dalam panggung politik Indonesia terus menjadi isu yang memicu perdebatan. Meskipun adanya harapan akan terjadinya perubahan yang positif dengan terpilihnya pemimpin yang dianggap sebagai "outsider" dari keluarga elit politik, praktik politik dinasti yang melibatkan keluarga dekat pemimpin yang terpilih telah menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas demokrasi. Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, serta upaya Siti Nur Azizah dalam politik, menyoroti ketidakseimbangan dalam akses politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan dinasti politik. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, tetapi juga mengancam esensi demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok atau keluarga tertentu.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi pengaruh dinasti politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang sehat menjadi sangat penting dalam mendorong kemajuan politik dan sosial di Indonesia. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses politik, serta untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh dinasti politik.

### **Teori behavioral: mengapa politisi membentuk dinasti politik**

Teori behavioral menyajikan gambaran yang jelas mengapa politisi cenderung membentuk dinasti politik. Di balik keinginan politisi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan terdapat dorongan kuat, karena kekuasaan dianggap sebagai sumber keuntungan bagi diri sendiri dan keluarga. Politisi yang menciptakan dinasti politik cenderung berorientasi pada memperluas dan mempertahankan kekuasaan, sehingga mewariskan jabatan kepada keluarga menjadi salah satu strategi untuk merasa aman dari pengawasan dan kritik terhadap kebijakan yang diambil selama masa jabatannya. Selain itu, ada juga dorongan untuk memperluas imperium bisnis keluarga. Fenomena politik dinasti bukan hanya merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan beradab, tetapi juga merupakan deviasi dari semangat reformasi 1998. Praktik politik dinasti ini jelas menunjukkan bentuk nepotisme yang merugikan prinsip meritokrasi dan kesetaraan dalam persaingan politik yang sehat. Teori behavioral memberikan wawasan yang penting tentang motivasi individu dalam membentuk dinasti politik, yang pada akhirnya dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk mengatasi dan mencegah praktik politik yang merugikan demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan.

Meskipun banyak yang menganggap bahwa penciptaan suksesi dinasti oleh para pemimpin politik adalah strategi defensif untuk menghindari penuntutan korupsi di masa mendatang, perubahan dalam dinamika politik lokal yang melibatkan keluarga politik dan dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan demokrasi dan upaya penegakan hukum di suatu negara. Meskipun penciptaan suksesi dinasti politik seringkali dianggap sebagai strategi untuk

melindungi diri dari penuntutan korupsi di masa depan, namun penting untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana keluarga politik tersebut terlibat dalam politik informal yang lebih luas. Variasi dalam konfigurasi politik lokal dapat mempengaruhi kemungkinan terbentuknya aliansi anti-petahanan yang kuat, yang pada gilirannya dapat memaksa pemegang kekuasaan yang korup untuk mundur dari jabatannya. Ini mencerminkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sipil dalam memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi, serta menunjukkan bahwa dinamika politik lokal memiliki peran yang krusial dalam menentukan arah dan karakter sistem politik suatu negara. Dalam konteks ini, advokasi untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses politik lokal menjadi sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi dan penegakan hukum yang kuat.

### **Apa Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Demokrasi Pancasila?**

Pengaruh dinasti politik terhadap demokrasi Pancasila dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat. Meskipun pemilihan umum merupakan momen penting di mana rakyat bebas menentukan perwakilan mereka di pemerintahan, namun dominasi dinasti politik dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi. Ketika anggota dinasti politik memegang kendali atas posisi politik, ada risiko bahwa kepentingan pribadi dan kelompoknya akan didahulukan daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi Pancasila yang menekankan pada kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok atau individu. Maka dalam konteks demokrasi Pancasila, penting bagi pemimpin politik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan dan tindakan mereka, tanpa memandang kedekatan hubungan keluarga atau dinasti politik. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam proses politik, sehingga pemimpin politik harus bertanggung jawab atas kepentingan umum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Politik dinasti, dengan segala kompleksitas dan implikasinya, seringkali menjadi subjek perdebatan yang hangat di berbagai arena politik. Meskipun di satu sisi dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, praktik politik dinasti juga telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari proses politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Larangan terhadap keluarga tertentu untuk mencalonkan diri dipandang sebagai langkah yang menghambat demokrasi, sementara pada saat yang sama, larangan tersebut juga bisa dianggap sebagai perlindungan terhadap integritas politik dan penghindaran konflik kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam menangani fenomena ini secara hukum dan politik. Keputusan tersebut mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara memelihara prinsip demokrasi yang inklusif dan mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu keluarga atau dinasti politik. Dengan demikian, penanganan politik dinasti memerlukan pendekatan yang cermat dan terencana, yang mengakui perbedaan konteks dan dinamika politik setiap negara serta memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Perbedaan pendapat dengan konteks pro dan kontra politik dinasti, terdapat dua pemahaman yang saling bertentangan mengenai makna demokrasi. Di satu sisi, politik dinasti dianggap tidak bertentangan dengan demokrasi, karena dalam banyak kasus, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan politik individu untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Namun, di sisi lain, praktik politik dinasti sering kali melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, karena dapat membatasi akses yang adil dan setara terhadap proses politik bagi semua warga negara. Munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis tentang apakah politik dinasti membatasi atau menggerus demokrasi menjadi penting dalam analisis ini.

Sebagaimana ungkapan di atas, politik dinasti telah menjadi fenomena yang ada sejak lama, bahkan dapat ditelusuri hingga era kerajaan di mana kekuasaan seringkali diturunkan secara turun-

temurun. Perdebatan tentang politik dinasti mencerminkan pertarungan antara kepentingan individu atau keluarga tertentu dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berusaha menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang untuk menilai dampak politik dinasti terhadap sistem politik dan demokrasi secara keseluruhan.

Fenomena pemilihan kepala desa secara langsung, politik dinasti menjadi hal yang lumrah terjadi. Meskipun proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat, namun keberadaan politik dinasti masih tetap terasa. Bahkan dengan masuknya era reformasi, di mana kekuasaan seharusnya diperoleh melalui proses demokratis seperti pemilihan langsung, praktik politik dinasti masih tetap bertahan. Pertanyaan mengenai apakah politik dinasti membatasi demokrasi atau tidak, jawabannya dapat bervariasi. Di satu sisi, politik dinasti dapat dianggap sebagai pembatas terhadap demokrasi karena praktik-praktiknya seringkali mempengaruhi proses yang seharusnya demokratis menjadi tidak demokratis. Campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya finansial serta infrastruktur politik yang kuat dapat merusak integritas proses demokrasi. Dengan demikian, meskipun terdapat elemen-elemen demokrasi seperti pemilihan langsung, namun esensi demokrasi tersebut menjadi tercemar oleh campur tangan politik dinasti. Seperti yang dikatakan oleh Nurgiansah (2022), fenomena ini dapat diibaratkan sebagai "bungkusnya demokrasi tetapi isinya tidak demokratis".

Di tengah evolusi politik Indonesia, fenomena politik dinasti terus menarik perhatian sebagai isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun proses pemilihan pemimpin telah berubah dari pewarisan langsung ke jalur politik yang lebih formal, namun praktik politik dinasti tetap bertahan, mengubah cara demokrasi dipahami dan dijalankan. Dalam konteks ini, konsep "patrimonialistik dibungkus dengan prosedural" menjadi semakin relevan, mempertanyakan esensi demokrasi yang seharusnya mengedepankan meritokrasi dan kesetaraan. Politik dinasti, dengan menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik, menghadirkan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan inklusif. Sehingga, perdebatan tentang kebenaran atau kesalahan politik dinasti dalam konteks demokrasi tetap membara, dengan implikasi yang mendalam terhadap kualitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan yang kita anut. Dalam memahami implikasi politik dinasti terhadap demokrasi, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi bagaimana praktik-praktik ini mempengaruhi representasi politik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Hanya dengan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan politik benar-benar melayani kepentingan rakyat.

Melalui perspektif yang berlawanan, politik dinasti dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sebagian besar sistem pemerintahan modern. Secara khusus, politik dinasti dianggap lebih sesuai untuk diterapkan dalam konteks sistem pemerintahan monarki, di mana garis keturunan dan praktik nepotisme menjadi landasan penentuan pemimpin. Fenomena politik dinasti sering kali dipandang sebagai kesalahan karena dapat mengkonsolidasikan kekuasaan dalam tangan sekelompok kecil yang terhubung melalui ikatan keluarga. Diketahui kecenderungan politik dinasti untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan dan kesempatan yang adil. Upaya menjaga kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga juga berpotensi merugikan individu-individu yang lebih berkualifikasi dan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memimpin, karena mereka dapat terpinggirkan oleh pertimbangan subjektif yang lebih mengutamakan ikatan keluarga daripada kualifikasi dan kinerja. Sehingga dalam konteks demokrasi yang sehat dan inklusif, politik dinasti sering kali dianggap sebagai hambatan yang menghalangi terciptanya sistem pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Secara yuridis formal, Dalam upaya mencegah perkembangan politik dinasti yang terus berlangsung, diperlukan langkah-langkah konkret yang mengarah pada reformasi internal partai politik. Oligarki yang ada di dalam struktur partai politik seringkali mengganggu mekanisme kandidasi dan pencalonan, sehingga proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip

demokrasi yang seharusnya mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen politik di dalam partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme yang lebih demokratis dalam pemilihan calon, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai secara adil dan terbuka. Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan aturan internal partai politik juga menjadi langkah penting untuk mengurangi praktik politik dinasti. Memastikan bahwa proses rekrutmen politik dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang objektif, diharapkan dapat mengurangi dominasi politik dinasti dan mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat dan berintegritas dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Dalam menghadapi fenomena politik dinasti, penting untuk memberi perhatian khusus pada proses rekrutmen politik sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga kesehatan sistem politik. Proses rekrutmen yang tidak transparan dan tidak didasarkan pada kriteria-kriteria yang objektif dapat menjadi sumber permasalahan dalam sistem politik suatu negara. Ketika partai politik tidak menjalankan proses rekrutmen dengan baik, dapat menghasilkan calon-calon dan kader-kader yang kurang berkualitas dan berintegritas, bahkan mendorong praktik politik dinasti yang merugikan bagi demokrasi. Selain itu, kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga berpotensi mengganggu kontrol dan keseimbangan pemerintahan yang penting dalam negara demokratis.

Maka reformasi dalam proses rekrutmen politik menjadi sangat penting untuk menjaga integritas sistem politik dan mencegah terjadinya dominasi politik dinasti yang merugikan bagi demokrasi. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa seleksi kandidat didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan integritas, bukan pada hubungan keluarga atau kedekatan personal. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi yang adil dan setara dalam proses politik. Setiap warga masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan penting, asalkan memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. Namun, kenyataannya adalah bahwa peluang ini seringkali terbatas bagi sebagian kecil individu atau kelompok yang memiliki ikatan kekerabatan atau kedekatan emosional. Hal ini menyebabkan jabatan-jabatan penting dikontrol oleh segelintir orang atau dinasti politik, yang dapat menghambat pluralisme politik dan keterbukaan dalam sistem demokrasi.

## **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, fenomena politik dinasti merupakan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Praktik politik dinasti, yang seringkali melibatkan pewarisan kekuasaan secara turun-temurun dalam keluarga politik, dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan partisipasi yang adil, kesetaraan akses politik, dan akuntabilitas pemerintah. Reformasi dalam proses rekrutmen politik menjadi krusial untuk mencegah dominasi politik dinasti yang merugikan bagi demokrasi, dengan memastikan seleksi kandidat didasarkan pada kualifikasi dan integritas, bukan pada hubungan keluarga atau kedekatan personal. Diperlukan juga upaya meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi yang adil dan setara dalam proses politik. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa sistem politiknya benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok atau individu.

## **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Graffindo.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*; Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Haliim, Wimmy, and Andy Ilman Hakim, 'Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik', *Jurnal Politik Profetik*, 8.2 (2020), 258 <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a4> Indonesia, 3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Terus Diterapkan di, 'No Title', IDN Times
- Heryanto, Gun-Gun. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Nika, Imroatun, 'Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.3 (2021), 562–77

Susanti, Martien Herna, 'Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia', *Journal of Government and Civil Society*, 1.2 (2018), 111

Tempo.co. 2020. Poiitk Dinasti Era Jokowi. <https://kolom.tempo.co/read/1366994/politik-dinasti-era-jokowi/full&view=ok> diakses pada tanggal 24 Juli 2020.